

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DALAM MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN
PENDUDUK DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

(Studi Kasus : Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota
Yogyakarta)

Oleh:
Syifa Siti Fatimah
20150520050

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah


Dosen Pembimbing


Dr. Ane Permatasari, S.IP.,MA.
NIK: 19690307199603 163 037

Mengetahui,


**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038


**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DALAM MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN
PENDUDUK DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

(Studi Kasus : Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota
Yogyakarta)

Syifa Siti Fatimah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email : Syifasitifatimah89@gmail.com

ABSTRAK

Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang pesat perkembangannya khususnya dalam hal kependudukan. Di dalam meminimalisir pertumbuhan penduduk upaya pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu dengan membentuk Kampung Keluarga Berencana. RW 12 Kelurahan Prawirodirjan menjadi Kampung KB pertama dengan jumlah unmeet need tertinggi dan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Gondomanan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran Dinas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB di Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Penelitian ini dalam menganalisis dan mengumpulkan data menggunakan metode kualitatif melalui wawancara langsung, observasi, dokumentasi dan data yang didapatkan dilapangan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teori Rizzo dimana pada penelitian ini menggunakan empat kategori peran yaitu wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan. Kemudian teori Subri yang mempunyai empat komponen yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar.

Peran yang dilakukan Dinas sebagai pembina Kampung KB sangat erat kaitannya dengan program-program yang telah direncanakan. Sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan serta Dinas mempunyai peran dalam menggandeng sektor lain untuk ikut terlibat dalam program Kampung KB. Terdapat empat indikator yang dapat mengukur peran Dinas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk yaitu wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan. Kemudian pada pengendalian pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga indikator yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 melalui program Kampung KB dilihat dari empat indikator peran masih belum optimal dikarenakan

masih terdapat tiga indikator yang tidak tercapai yaitu CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*), *Unmetneed* dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga. Pada pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta melalui pengendalian angka kelahiran dan kematian sudah dapat diminimalisir, namun tidak pada migrasi masuk dan keluar masih sulit dikendalikan karena Dinas dan Pemerintah Daerah tidak dapat menolak penduduk melakukan migrasi masuk dan keluar selama dapat memenuhi syarat. Sehingga Dinas perlu meningkatkan strategi pada indikator yang belum tercapai realisasinya.

Kata Kunci : Peran Dinas , Kampung KB, Pengendalian Penduduk.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan negara Filipina. Dilansir melalui berita online Okezone, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat antara negara-negara ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa bila dibandingkan dengan negara Brazil dengan jumlah penduduk terbanyak kelima yaitu 209 juta jiwa (Okezone, 2018). Populasi penduduk di Indonesia menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah daerah tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk (Tatuhe dkk, 2016). Daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi biasanya terjadi di daerah-daerah perkotaan dimana banyaknya para urban yang mendatangi kota-kota tersebut sebagai daerah yang memiliki mobilitas tinggi yang menjadi pusat dalam setiap daerah. Kota sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai ketersediaan akses yang sangat mudah didapatkan oleh

masyarakat di daerah perkotaan. (Chistiani dkk, 2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB sebagai salah satu inovasi pemerintah daerah. Oleh karena itu menurut Rahma (2016) tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian dilain pihak. Pada tahun 2016 hingga 2018 jumlah kelahiran per Kecamatan Kota Yogyakarta yaitu 4.424 jiwa. Hal ini yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan pesat disamping tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan struktur umur penduduk yang kurang seimbang. Masalah lainnya adalah penyebaran penduduk yang juga kurang merata di beberapa daerah yang disebabkan oleh keadaan geografis yang berbeda-beda disetiap daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan

merupakan hal yang ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Selain itu, dijelaskan juga dalam undang-undang pada pasal 1 ayat 3 bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Seperti dalam penelitian Riyono (2014), Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang pesat perkembangannya khususnya dalam hal kependudukan. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan predikat kota pelajar, kota wisata, dan kota budaya yang akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Berikut data jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2016 hingga 2018 yaitu :

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk WNI Kota Yogyakarta

Tahun	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	200.595	210.687	411.282
2017	201.296	211.396	412.692
2018	201.395	211.331	412.726

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (2018)

Berdasarkan data pada tabel diatas mendeskripsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 hingga 2017 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1.410 jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 hingga 2018 jumlah penduduk hanya mengalami peningkatan sebesar 34 jiwa. Pertambahan penduduk di Kota Yogyakarta ini terjadi baik karena kelahiran, kematian maupun imigrasi dengan demikian akan terjadi peningkatan berbagai macam tuntutan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana, yang akan berpengaruh pula pada kepadatan penduduk (Riyono, 2014). Pemerintah daerah harus melakukan tindakan agar dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan peranan badan atau instansi yang kompeten dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.

Proses meminimalisir pertumbuhan penduduk salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yaitu membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB). Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai fungsi sebagai pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Maka dilansir melalui berita online Tribun Jogja, sebagai salah satu inovasi pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta kampung KB merupakan satuan

wilayah setingkat RW, Dusun atau setara dengan kriteria tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. (Tribunnews, 2018)

Program kampung KB (2017) merupakan salah satu terobosan yang di desain khusus untuk menggerakkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat dusun atau kampung yang pemilihannya berdasarkan kriteria dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional sehingga masing-masing wilayah kampung KB memiliki karakteristik yang berbeda. Faktor yang melatarbelakangi terpilihnya Kampung KB adalah rendahnya peserta KB dan banyak remaja yang menikah dini di wilayah kumuh, daerah aliran sungai, kawasan miskin perkotaan dan padat penduduk. (Kampung KB, 2017)

Dilansir melalui berita online Nasional Republika, dibentuknya Kampung KB di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 yakni di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan. Selanjutnya pada tahun 2017 telah bertambah sebanyak 13 Kampung KB berbasis rukun warga (Nasional Republika, 2017). Diantara 14 Kampung KB yang telah diresmikan di Kota Yogyakarta peneliti memilih RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan dengan jumlah unmeet need tertinggi dan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Gondomanan, berikut data jumlah penduduk Kecamatan Gondomanan dimulai tahun 2016 hingga 2019 seperti berikut :

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk WNI Per Kelurahan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta

Tahun	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	Ngupasan	2774	2959	5733
	Prawirodirjan	4577	4779	9356
2017	Ngupasan	2755	2919	5674
	Prawirodirjan	4587	4788	9375
2018	Ngupasan	2751	2912	5663
	Prawirodirjan	4560	4779	9339

Sumber data : Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (2018)

Berdasarkan data di atas memperlihatkan jumlah penduduk Kelurahan Prawirodirjan memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan Kelurahan Ngupasan. Terlihat sejak tahun 2016 hingga 2018 kelurahan Prawirodirjan mengalami peningkatan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu signifikan. Sehingga hal ini berguna untuk melihat peran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB yang telah ditetapkan di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan.

Mengutip hasil wawancara berita online Antara Jogja dengan ketua Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Eny Retnowati di Yogyakarta, bahwa pembentukan Kampung KB merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat sejak 2016. Kampung KB yang berada di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan terpilih menjadi salah satu RW yang justru merupakan wilayah yang memiliki tingkat partisipasi KB rendah, serta masuk dalam daerah miskin atau berada di lokasi yang dinilai kumuh. Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui Kampung KB tersebut diantaranya ditempuh dengan menghidupkan berbagai kegiatan pembinaan di kampung seperti pembinaan keluarga balita, kegiatan untuk konseling remaja hingga kegiatan untuk lansia.

Tingginya angka *unmeet need* di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan merupakan salah satu permasalahan yang menjadikan salah satu kriteria ditetapkannya Kampung KB pertama di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan. Kondisi ini yang membuat pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB bisa diatasi dengan megisyaratkan keinginan pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan untuk menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terkait dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. David Williams (dalam Putri, 2013) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Lokasi penelitian program Kampung KB ini berada di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan. Sumber data yang diperoleh peneliti yaitu data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

KERANGKA TEORI

1. Peran

a. Definisi Peran

Peran berarti laku, bertindak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Harahap (dalam Putra, 2014) menyatakan bahwa makna peran yang

dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial.

Menurut wirutomo (dalam Hestia, 2014) menyatakan bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

b. Jenis Peran

Menurut Arimbi (dalam Handayani, 2018) mengemukakan beberapa jenis dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi, penganut paham ini mengendalikan peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
- 3) Peran sebagai alat komunikasi, peran di day gunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses

pengambilan keputusan, persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsivedan responsibel.

- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
- 5) Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti hanya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

c. Indikator Peran

Menurut Rizzo (dalam Dzikri, 2017) menyatakan bahwa peran diukur menggunakan indikator-indikator. Adapun penjelasan di bawah ini :

- 1) Wewenang, yaitu merasa dengan pasti seberapa besar wewenang yang dimiliki dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.
- 2) Tanggung jawab, yaitu mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa perlunya membagi waktu dengan tepat.
- 3) Kejelasan tujuan, yaitu apa yang menjadi tanggung jawab dan

penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan adalah jelas.

- 4) Cakupan pekerjaan, yaitu mengetahui dari pekerjaan dan bagaimana kinerjanya dievaluasi.

2. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

A. Definisi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Sartika (2012) mengemukakan bahwa program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi, misalnya untuk subsidi pangan, pendidikan, bahan bakar dan juga subsidi kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menggalakkan program KB (keluarga berencana) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Maka dengan adanya pengendalian, pertumbuhan penduduk dapat dibatasi dengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran melalui program KB demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan karena terjadinya suatu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di suatu Negara maka Pemerintah akan melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. (Rahma, 2016)

B. Jenis Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Menurut Bruce J.Cohen (dalam Muliana, 2015) terdapat beberapa jenis-jenis cara untuk mengendalikan masyarakat, yaitu :

1) Pengendalian Lisan (Pengendalian Sosial Persuasif)

Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

2) Pengendalian Simbolik (Pengendalian Sosial Persuasif)

Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan dan lain-lain.

3) Pengendalian Kekerasan (Pengendalian Koersif)

Pengendalian melalui cara-cara kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama.

A. Indikator Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Pengendalian pertumbuhan penduduk menurut Subri (2003) merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Terdapat empat komponen yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yaitu:

- a) Kelahiran (fertilitas);
- b) Kematian (mortalitas);
- c) Migrasi masuk dan Migrasi keluar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tentunya tidak lepas dari beberapa program yang dibuat. Program-program yang ada tentunya berhubungan dengan tugas yang dimiliki dinas yaitu dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran, kematian, maupun imigrasi. Kemudian dibentuknya Kampung KB menjadi salah satu program Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di samping untuk mensejahterakan warga maupun masyarakat.

Terdapat empat indikator yang dapat mengukur peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta melalui program Kampung KB, yaitu :

1. Wewenang Dinas dalam

Program Kampung KB RW 12

Kelurahan Prawirodirjan

Dalam pasal 4 Perwal Nomor 65 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Dinas mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 6) Pelaksanaan pengawasan. Pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi belum terdapat wewenang yang mengatur pada pelaksanaan tugas yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Apabila dilihat dari tugas dan fungsi yang dimiliki dinas, maka dinas memiliki hak dalam menjalankan program pemerintah daerah yaitu program Kampung KB sebagai program Pemerintah daerah

dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana.

Wewenang yang dimiliki dinas di setiap kegiatan Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan yaitu sebagai pembina Kampung KB, dan pelaksana monitoring dan evaluasi. Pembinaan yang dilakukan Dinas sudah berjalan dengan baik karena Dinas dapat melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang berjalan dengan perencanaan yang dibuat. Hal ini juga dapat terlihat tugas Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui program Kampung KB. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki dinas sebagai pembina Kampung KB hal ini akan lebih efektif dilakukan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang ada di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan.

2. Tanggung Jawab Dinas pada Kegiatan Kampung KB Rw 12 Kelurahan Prawirodirjan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah unsur pendukung tugas Walikota Yogyakarta yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2018, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Terdapat lima indikator kinerja dinas yaitu, rata-rata jumlah anak dalam keluarga, CBR (*Crude Birth Rate*), CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*), *Unmeetneed*, dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga.

Kelima indikator kinerja Dinas terdapat dua indikator yang telah tercapai realisasinya yaitu rata-rata jumlah anak dalam keluarga dan CBR (*Crude Birth Rate*). Akan tetapi masih terdapat tiga indikator yang tidak tercapai pada program keluarga berencana dan pembangunan keluarga yaitu CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*), *unmeet need*, dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga.

Pada indikator Kelompok Kegiatan Bina Keluarga, hal ini disebabkan pada sumber daya manusia yang dimiliki Dinas tidak sebanding dengan jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga sehingga Dinas belum mempunyai strategi pada permasalahan ini. Sehingga realisasi pada indikator Kelompok Kegiatan Bina Keluarga tidak tercapai. Kemudian masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga serta permasalahan pada pergantian kader baru yang belum dapat menjalankan kegiatan secara optimal.

Kemudian pada indikator CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) dan *unmeet need* masih terdapat data anomali dimana jumlah CPR rendah akan tetapi jumlah *unmeet need* tinggi. Hal ini juga disebabkan karena peran Dinas dalam membina kegiatan indikator belum secara maksimal. Kemudian dilihat dari partisipasi masyarakat masih kurang optimal karena masyarakat tidak menggunakan metode kontrasepsi modern maupun terdapat alasan fertitas. Pada indikator *unmeet need* ini juga masih terdapat masyarakat yang enggan mengatakan telah menggunakan alat kontrasepsi, hal ini dikarenakan alasan budaya sosial.

Tanggung jawab tugas yang dimiliki Dinas belum sepenuhnya tercapai dengan baik, akan tetapi dengan ini Dinas sudah bisa merealisasikan tanggung jawabnya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2018.

3. Kejelasan Tujuan Indikator

Kinerja Program Dinas

Kejelasan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian misi keempat Pemerintah Kota Yogyakarta melalui strategi daerah yang telah ditetapkan perlu didukung dengan hasil pengukuran indikator kinerja program kegiatan Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta. Pada pertengahan tahun

2018, dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2017 maka dinas melakukan review terhadap target indikator program yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Kejelasan tugas yang dimiliki Dinas yaitu pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua program tersebut memiliki kejelasan tujuan yang jelas dengan tugas yang dimiliki Dinas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB pada program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kejelasan tujuan pada program yang dimiliki Dinas menjadi wewenang dan tanggung jawab dinas dalam menjalankan program tersebut dengan baik.

Sejauh ini kejelasan tujuan yang hendak dicapai Dinas telah mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kejelasan tujuan program Kampung KB oleh Dinas pada tahun 2016 memang baru dicanangkan belum terlihat nilai keberhasilan program pada tahun pertama. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 kejelasan tujuan Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta telah mempunyai pencapaian kinerja seperti yang telah dijelaskan sebagaimana penjelasan diatas. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dengan tugas yang dimiliki Dinas pada program Kampung KB memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dilihat dari baru dicanangkannya program ini pada

tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 baru dapat terlihat kejelasan tujuan pada program Kampung KB ini.

4. Cakupan Pekerjaan Dinas dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

Sebagai bentuk tanggung jawab Dinas dalam menjalankan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan hak yang dimiliki Dinas sebagai pembina Kampung KB sebagai koordinator dan fasilitator. Cakupan pekerjaan pada program Kampung KB diperluas sebagai realisasi dari program yang dicanangkan BKKBN. Perluasan cakupan pekerjaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta diharapkan program kerja yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik dan dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

Selain itu cakupan lintas sektoral juga dilakukan dalam membantu urusan kependudukan dan KB seperti dalam pemberdayaan ekonomi Dinas dapat bersinergi dengan Dinas Pertanian, Dinas sosial. Kemudian sinergi dengan lintas sektor dilakukan di 14 Kampung Kb yang diharapkan dengan perluasan cakupan ini program Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta dapat terealisasi dan dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

Salah satu contoh lintas sektoral yang dilakukan Dinas dengan Dinas Kesehatan dan Komando Rayon Militer yaitu pembenahan sanitasi rumah warga di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan.

Cakupan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas telah diperluas sehingga indikator program yang ada dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Namun memang belum sepenuhnya cakupan yang dimiliki Dinas terasa oleh 14 Kampung KB yang ada dikarenakan setiap Kampung KB mempunyai kriteria masalah yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu bentuk peran Dinas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pembina Kampung KB. cakupan pekerjaan yang telah terlaksana dengan beberapa lintas sektoral menjadi kejelasan tujuan yang hendak dicapai di dalam mensejahterakan kehidupan warga atau masyarakat.

B. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Tugas yang dimiliki Dinas dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan upaya pemerataan penduduk di suatu wilayah pada perubahan populasi yang disebabkan oleh tiga indikator yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam Bab IV RPJMD Kota Yogyakarta periode tahun 2017-2022, disebutkan beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta salah satunya masalah tertib administrasi kependudukan dan

kepadatan penduduk. Hal ini terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta jika menysasar pada persoalan kepadatan penduduknya, dengan salah satu cara yaitu pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran.

Sebagai bentuk tanggung jawab tugas yang dimiliki Dinas maka di dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Melihat hal ini maka pengendalian pertumbuhan penduduk melalui tiga indikator, yaitu:

A. Kelahiran

Indikator tugas utama atau sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta adalah rata-rata jumlah anak dalam keluarga dua. Pengendalian angka kelahiran melalui metode kontrasepsi modern dapat dilakukan melalui IUD, Implan, MOP, MOW, Pil, Suntik, dan Kondom. Kemudian menurunkan angka *unmeet need* atau menurunkan jumlah pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak kembali dan menginginkan anak tunda yang belum menggunakan metode kontrasepsi modern.

Melalui program Kampung KB diharapkan sasaran strategis kelahiran penduduk dapat terkendali

melalui program-program yang ada. Hal ini menjadi tanggung jawab tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagai pembantu Pemerintah Daerah dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kelahiran sudah dapat dikendalikan melalui kegiatan-kegiatan di dalam program Kampung KB. Kejelasan tujuan yang dimiliki Dinas dalam mengendalikan penduduk dan keluarga berencana masih menjadi tanggung jawab yang berat mengingat kelahiran bayi pertahun dapat meningkat pada waktu yang tertentu.

Kemudian pada perubahan angka *unmetneed* yang tidak menentu dapat ikut mempengaruhi angka kelahiran yang tinggi pula. Hal ini dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) pada penggunaan alat kontrasepsi modern. Dilihat dari hambatan yang dirasakan masih banyak pasangan usia subur yang memilih untuk tidak kb walaupun mereka sudah tidak menginginkan anak lagi maupun menginginkan anak tunda.

Peningkatan partisipasi KB banyak didukung oleh peran wanita dalam penggunaan alat kontrasepsi tercatat tingkat kesertaan KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan adalah 2,5 persen. Kontribusi wanita dalam menggunakan alat atau metode kontrasepsi dapat mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan

penduduk. Semakin tinggi angka kesertaan KB maka dapat dikatakan semakin tinggi pula penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan wanita yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem reproduksi, sehingga dapat memutuskan mengatur dan mencegah kelahiran. Kemudian pada usia PUS dimana akan semakin kecil atau menurun resiko seseorang terhadap kemampuan untuk hamil dan jumlah PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun dibandingkan dengan jumlah PUS sangatlah sedikit.

Permasalahan ini menjadi penting mengingat peran Dinas dalam pengendalian penduduk sebagai pembina Kampung KB belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa indikator program yang mengalami penurunan sehingga beberapa kegiatan yang ada di Kampung KB masih belum terlaksana dengan baik. Apabila melihat data unmeet need dengan kesertaan KB di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan memang mengalami perubahan yang signifikan akan tetapi dalam hal ini peran dinas dalam menjalankan tugasnya masih perlu ditingkatkan agar mendapat hasil yang maksimal.

B. Kematian

Tingkat kesehatan masyarakat menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk karena sangat berpengaruh terhadap angka kematian, terutama angka kematian bayi dan secara

jangka panjang akan meningkatkan angka harapan hidup. Kebijakan penurunan angka kematian diwujudkan dengan penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan serta penurunan angka kematian bayi dan anak.

Menurut Undang-undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 19 ayat 2 menjelaskan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui :

- a) Pengendalian kelahiran;
- b) Penurunan angka kematian; dan
- c) Pengarahan mobilitas penduduk.

Tanggung jawab yang dimiliki dinas bukan hanya pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, akan tetapi pada permasalahan kematian ibu dan anak. Kematian merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk.

Angka kematian yang tidak sebanding dengan angka kelahiran dan tingginya angka kelahiran dari setiap ibu dengan memiliki anak rata-rata dua anak. Hal ini yang dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta tidak dapat di kendalikan sehingga menyebabkan kematian yang sangat perlu diwaspadai karena berhubungan dengan angka kematian ibu hamil atau melahirkan. Usaha yang

dilakukan untuk menekan angka kematian ibu hamil dan melahirkan, salah satu solusinya adalah penggunaan alat kontrasepsi. Diharapkan dengan pemakaian alat kontrasepsi ini dapat mencapai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Dibentuknya program Kampung KB menjadi salah satu upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program pengendalian kelahiran juga di dalamnya terdapat kelompok kegiatan bina keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dimana dilakukan pembinaan terhadap balita dan anak, pembinaan terhadap remaja, serta pembinaan terhadap lansia. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat mengendalikan angka kelahiran juga kematian pada ibu hamil atau melahirkan sehingga terwujud pembangunan ketahanan dan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menjelaskan bahwa angka kematian dapat dikendalikan melalui penggunaan alat kontrasepsi dan juga kegiatan kelompok bina keluarga. Sehingga kematian pada ibu hamil atau melahirkan tidak terjadi dan pertumbuhan penduduk dapat terkendali melalui pengendalian kelahiran dan pencegahan kematian. Akan tetapi dilihat dari hasil rekapitulasi mutasi kematian dari tahun 2016-2018 Kelurahan Prawirodirjan memiliki jumlah 167 orang dengan jumlah yang masih

terbilang banyak. Sementara angka kematian juga sulit untuk diprediksi karena banyak sedikitnya kasus kematian akan sangat bergantung pada derajat kesehatan masyarakat, ada tidaknya wabah penyakit dan faktor bencana alam.

C. Migrasi masuk dan keluar

Pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta bukan hanya disebabkan oleh kelahiran dan kematian, namun juga terjadi karena migrasi masuk dan keluar. Dikenal sebagai kota wisata, kota budaya dan kota pelajar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengadu nasib untuk mencari kerja maupun untuk sekolah. Hal ini kemudian berimbas pada tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk cenderung fluktuatif. Artinya, jumlah penduduk di suatu waktu berkurang atau minus, tetapi di waktu lain mengalami penambahan penduduk.

Pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta bukan hanya disebabkan oleh kelahiran dan kematian, namun juga terjadi karena migrasi masuk dan keluar. Dikenal sebagai kota wisata, kota budaya dan kota pelajar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengadu nasib untuk mencari kerja maupun untuk sekolah. Hal ini kemudian berimbas pada tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk cenderung fluktuatif. Artinya, jumlah penduduk di suatu waktu berkurang

atau minus, tetapi di waktu lain mengalami penambahan penduduk.

Pengendalian pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena migrasi masuk maupun keluar bukanlah pekerjaan yang mudah untuk diminimalisir juga diatur. Menyangkut dengan hak seseorang untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Sepanjang memenuhi persyaratan untuk pindah dan daerah yang akan ditempati memungkinkan untuk itu, maka pemerintah daerah tidak dapat menolak penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun penduduk yang akan pindah/pergi (migrasi keluar).

Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan melakukan migrasi masuk dan keluar terbanyak yaitu antar kota maupun antar provinsi. Berdasarkan data rekapitulasi migrasi masyarakat Kelurahan Prawirodirjan menunjukkan bahwa aktivitas migrasi masuk lebih besar dan tidak sebanding dengan banyaknya migrasi keluar. Hal ini membuat jumlah penduduk khususnya penduduk usia produktif di Kota Yogyakarta semakin bertambah. Kemudian hal ini membuktikan jika masyarakat mengincar kota-kota besar dengan memiliki peluang keterserapan dunia kerja yang tinggi, dan tingkat pendidikan lebih tinggi.

Migrasi sebenarnya merupakan suatu fenomena sosial yang normal dan biasa terjadi. Namun permasalahan timbul apabila migrasi tidak terkendali dan menimbulkan

dampak sosial bagi suatu daerah sehingga mempengaruhi pembangunan masyarakat dalam suatu wilayah serta berbagai rentetan resiko yang ada di dalam aktivitas migrasi.

KESIMPULAN

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 melalui program Kampung KB dilihat dari empat indikator peran yaitu wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan dan cakupan pekerjaan. Pada keempat indikator ini peran Dinas masih belum optimal dikarenakan masih terdapat tiga indikator yang tidak tercapai yaitu CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*), *Unmeetneed* dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga.

Pada pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta melalui pengendalian angka kelahiran dan kematian sudah dapat diminimalisir, namun tidak pada migrasi masuk dan keluar karena masih sulit dikendalikan karena Dinas dan Pemerintah Daerah tidak dapat menolak penduduk melakukan migrasi masuk dan keluar selama dapat memenuhi syarat.

SARAN

1. Mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja yang telah tercapai melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program KKBPK.
2. Meningkatkan strategi pada indikator yang belum tercapai realisasinya.
3. Meningkatkan peran dinas pada kelompok bina keluarga, remaja dan lansia.
4. Melakukan evaluasi secara berkala pada kegiatan Kampung KB.

DAFTAR PUSTAKA

- Arieza, U. 2018. Indonesia Penduduk Terbanyak Nomor 4 di Dunia, Siapa Juaranya. Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2018/07/21/3201925559/indonesiapenduduk-terbanyak-nomor-4-di-dunia-siapa-juaranya>.
- Dzikri, D. (2017). Pengaruh Ketidakjelasan Peran dan Konflik Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal (Studi pada PT. Kereta Api (Persero) Bandung). (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Eric, I., Gita, A. 2017. Pemkot Yogya Luncurkan Kampung KB. Diakses melalui <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/13/ow7sm2423pemkot-yogya-luncurkan-kampung-kb>.
- Handayani, S. W. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Kahuripan*, 2(1).
- Hestia., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2014). Peranan Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jati Agung Tahun Pelajaran 2012/2013. *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 1 (6).
- Meridian. (2017). Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat. Diakses melalui <http://kampungkb.bkkbn.go.id/about>.
- Muliana, Sri. 2015. Kontrol Sosial terhadap Kenakalan Remaja Dikomplek ADB Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Studi Ilmu Sosiologi*, 1-76.
- Putra, R. R. (2014). Peran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser dalam Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Batubara di Kecamatan Batu Sopang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2 (4), 1-12.
- Putri Febriani, H. (2013). Pemberian Motivasi Kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pustakawan di UPT Perpustakaan IAIN Surakarta

- (Doctoral dissertation, Ilmu Perpustakaan).
- Rahma, Marita. 2016. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pelaksanaan Program KB Dinamis/Tim KB Keliling (Analisis terhadap Implementasi Program KB Dinamis/TKBK di Kabupaten Pringsewu). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandar Lampung.
- Riyono, M. S. (2014). Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Apartemen di Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, UAJY).
- Sartika, F. (2012). Model Komunikasi Kesehatan Kader Desa dalam Sosialisasi Keluarga Berencana pada Masyarakat (*Studi pada Kader di Desa Tumpang, Kabupaten Malang*) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Setiawan, W. 2018. Kampung KB Upaya Pemkot Kota Yogyakarta kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk. Diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2018/12/06/kampung-kb-upaya-pemkot-yogya-kendalikan-laju-pertumbuhan-penduduk>.
- Subri, Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Tatuhe, S., Laloma, A., &Pesoth, W. (2016). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud), *1 (37)*, 1–13.